

Kantor SKIPM Tahuna Kantor SKIPM
Tahuna Kantor SKIPM Tahuna Kantor
SKIPM Tahuna Kantor SKIPM Tahuna
Kantor SKIPM Tahuna Kantor SKIPM
Tahuna Kantor SKIPM Tahuna Kantor
SKIPM Tahuna Kantor SKIPM Tahuna
Kantor SKIPM Tahuna Kantor SKIPM
Tahuna Kantor SKIPM Tahuna Kantor
SKIPM Tahuna Kantor SKIPM Tahuna
Kantor SKIPM Tahuna Kantor SKIPM
Tahuna Kantor SKIPM Tahuna Kantor
SKIPM Tahuna Kantor SKIPM Tahuna
Kantor SKIPM Tahuna Kantor SKIPM
Tahuna Kantor SKIPM Tahuna Kantor
SKIPM Tahuna Kantor SKIPM Tahuna
Kantor SKIPM Tahuna Kantor SKIPM
Tahuna Kantor SKIPM Tahuna Kantor
SKIPM Tahuna Kantor SKIPM Tahuna

STASIUN KIPM TAHUNA

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal
31 Desember 2025
Anaudited

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun KIPM Tahuna adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun KIPM Tahuna mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun KIPM Tahuna. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (*good governance*).



Tahuna,
Pit Kepala

Januari 2026

Aylin Syarif Lulu, S.Si
NIP 19820425 201012 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52
VI. Lampiran dan Daftar	53

STASIUN KIPM TAHUNA
JL PAHLAWAN, KEL. TIDORE KEC.TAHUNA TIMUR
KAB. KEPL SANGIHE, SULAWESI UTARA
TELEPON (0432) 21182

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun KIPM Tahuna yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tahuna, Januari 2026
Plt Kepala,



Aylin Syahet Lalu, S.Si
NIP 19820425 201012 2 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun KIPM Tahuna Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp0.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp dan Rp0.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp0 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp0. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp0.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp0 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**STASIUN KIPM TAHUNA****LAPORAN REALISASI ANGGARAN****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	#DIV/0!	10.519.425
Jumlah Pendapatan dan Hibah		-	-	#DIV/0!	10.519.425
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	#DIV/0!	1.849.591.085
Belanja Barang	B.4	-	-	#DIV/0!	1.534.271.821
Belanja Modal	B.5	-	-	#DIV/0!	-
Jumlah Belanja		-	-	#DIV/0!	3.383.862.906

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA**STASIUN KIPM TAHUNA****NERACA****PER 31 Desember 2025 DAN 31 DESEMBER 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Belanja Dibayar Dimuka	C.2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.5	-	-
Persediaan	C.6	-	55.516.219
Jumlah Aset Lancar		-	55.516.219
ASET TETAP			
Tanah	C.7	-	929.897.228
Peralatan dan Mesin	C.8	-	5.350.978.527
Gedung dan Bangunan	C.9	-	4.492.131.745
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.10	-	69.531.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	-	(5.737.003.770)
Jumlah Aset Tetap		-	5.105.534.730
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.12	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.13	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	5.161.050.949
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.15	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.16	-	5.161.050.949
JUMLAH EKUITAS DANA		-	5.161.050.949
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	5.161.050.949

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KIPM TAHUNA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	5.590.000
JUMLAH PENDAPATAN		-	5.590.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	1.849.591.085
Beban Persediaan	D.3	-	270.421.835
Beban Barang dan Jasa	D.4	-	953.616.786
Beban Pemeliharaan	D.5	-	171.241.277
Beban Perjalanan Dinas	D.6	-	351.824.855
Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat	D.7	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	-	488.632.354
Beban penyisihan piutang tak tertagih	D.9	-	-
JUMLAH BEBAN		-	4.085.328.192
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-	(4.079.738.192)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	(27.516.834)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	-	534.425
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	-	28.051.259
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	-	-
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	(27.516.834)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	(4.107.255.026)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.17	-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		-	(4.107.255.026)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**STASIUN KIPM TAHUNA****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	5.161.050.949	7.028.108.936
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-	(4.107.255.026)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Koreksi Revaluasi Aset Tetap	E.4.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.4.5	-	-
Koreksi Lain-lain	E.4.6	-	21.975
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	21.975
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(5.161.050.949)	2.240.175.064
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS		(5.161.050.949)	(1.867.057.987)
EKUITAS AKHIR	E.6	-	5.161.050.949

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Tahuna

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Stasiun KIPM Tahuna merupakan pemegang otoritas kompeten di Sangihe dalam mendeteksi dan melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya HPI/HPIK, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan system manajemen mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Berkedudukan di Kompleks Pelabuhan Laut Tahuna, Stasiun KIPM Tahuna mempunyai tugas “*Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dari resiko yang dapat timbul akibat masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan berbahaya serta sebagai instrument teknis untuk meningkatkan daya saing produk perikanan melalui sertifikasi kesehatan ikan*”. Dalam melaksanakan tugasnya Stasiun KIPM Tahuna menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- Melakukan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- Melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
- Melaksanakan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;

- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Melaksanakan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- Melakukan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Melakukan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Menerapkan system manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
- Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
- Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diatas Stasiun KIPM Tahuna berkomitmen dengan visi “ *Mewujudkan hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya.*”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Stasiun KIPM Tahuna adalah “ *Mewujudkan pencegahan penyebaran HPIK serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang mampu menjamin lalu lintas hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*”.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Stasiun KIPM Tahuna. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Stasiun KIPM Tahuna menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Stasiun KIPM Tahuna dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Stasiun KIPM Tahuna. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Stasiun KIPM Tahuna adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ,

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap **c. Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang

yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Cara Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Penjelasan atas Pos
Laporan Realisasi
Anggaran*

Satuan Kerja Stasiun KIPM Tahuna memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0. Selama tahun 2025, telah dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Stasiun KIPM Tahuna yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA

Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Uraian	TAHUN ANGGARAN 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	0	0
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	0	0

Realisasi

Pendapatan Rp0

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Satuan Kerja Stasiun KIPM Tahuna terdiri dari Pendapatan Jasa Karantina Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Pengujian, sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		-	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2025 mengalami kenaikan 0 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan dengan terbitnya PP 85 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak tanggal 18 September 2021 dilakukan penyesuaian dengan penggunaan tarif baru. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi senilai Rp0 ,Penerimaan Kembali Pegawai TAYL senilai Rp0 dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Rp0

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi	-	5.590.000	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	4.395.000	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	534.425	-100,00
Jumlah	-	10.519.425	-100,00

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**

Rp0

Realisasi Belanja Stasiun KIPM Tahuna pada TA 2025 adalah sebesar Rp0 atau 0% dari anggaran belanja sebesar Rp0. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
Pengembalian		-	-
Jumlah	-	-	#DIV/0!

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 0 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain karena tidak tersedianya pagu untuk belanja modal untuk tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	1.849.591.085	(100,00)
Belanja Barang	-	1.534.271.821	(100,00)
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	3.383.862.906	(100,00)

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp0

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.862.706.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 0 persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pengalihan pegawai Ke Badan Karantina Indonesia.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	860.510.693	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	57.006.078	(100,00)
Belanja Lembur	0	71.717.000	(100,00)
Belanja Lembur PPPK	0	1.814.000	(100,00)
Belanja Tunjangan Khusus/kegiatan	0	814.025.776	(100,00)
Belanja Tunjangan Khusus/kegiatan PPPK	-	44.517.539	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0	1.849.591.086	(100,00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	0	1.849.591.086	(100,00)

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp0

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.534.271.821. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan 0% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan, antara lain: pagu anggaran tahun 2025 lebih kecil daripada tahun yang lalu.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	622.499.890	(100,00)
Belanja Barang Non Operasional	0	101.629.329	(100,00)
Persediaan Lainnya	-	66.557.481	(100,00)
Belanja Jasa	-	229.487.567	(100,00)
Belanja Pemeliharaan	-	162.272.699	(100,00)
Belanja Perjalanan	-	351.824.855	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0	1.534.271.821	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	0	1.534.271.821	(100,00)

B.5 Belanja Modal

Belanja

Modal

Rp0

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan TA 2024 disebabkan antara lain karena tidak tersedianya pagu anggaran untuk belanja modal untuk tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	#VALUE!
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan pengadaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Gedung pelayanan dan area untuk aktivitas perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	#VALUE!
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin Rp0 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp0 mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengadaan peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung untuk gedung yang selesai direnovasi.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
AC	0	0	#DIV/0!
UPS	0	0	#DIV/0!
PC Unit	0	0	#DIV/0!
Printer	0	0	#DIV/0!
Laptop	0	0	#DIV/0!
Meubelair	0	0	#DIV/0!
Aquarium	0	0	#DIV/0!
Accses Point	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

Belanja Modal **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan Rp0 Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari renovasi Gedung Kantor untuk para pegawai baru dan meningkatkan kapasitas Gedung Kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pemasangan Atap dan Penataan Halaman Gedung Instalasi	0	0	#DIV/0!
Pengawasan Rehap Atap Gedung	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar Rp0

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Stasiun KIPM Tahuna per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp55.516.219.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Stasiun KIPM Tahuna per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)*

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)*

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Bukan Pajak
Rp0*

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)*

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang PNB	-	4.395.000
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	4.395.000

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek Rp0*

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Stasiun KIPM Tahunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp21.975, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP / TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Beban Dibayar di Muka
Rp0*

C.1.5. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Stasiun KIPM Tahuna per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	TH 2024	TH 2023
	-	-
		-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp0

C.1.6. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp55.516.219 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Jenis	TH 2025	TH 2024
Barang Konsumsi	-	362.074
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	55.154.145
Persediaan Lainnya	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Jumlah	-	55.516.219

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp0

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Stasiun KIPM Tahuna per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp5.105.534.730.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Stasiun KIPM Tahuna berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp0

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Stasiun KIPM Tahuna per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp929.897.228.

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	929.897.228
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Hibah	0
Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Revaluasi aset	-
Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2025	929.897.228
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	929.897.228

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2025

(dalam rupiah)

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1682m2	Jl. Pahlawan Tahuna Kab.Kepl Sangihe	929.897.228
		Jumlah	929.897.228

Peralatan dan Mesin
Rp0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Stasiun KIPM Tahuna per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp5.350.978.527. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	5.350.978.527
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Perbaikan	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian aset dari penggunaan	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2025	5.350.978.527
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	5.350.978.527

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp0

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp4.492.131.745. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2025
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	4.492.131.745
Mutasi tambah:	-
Pembangunan Gedung	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2025	4.492.131.745
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4.492.131.745

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp0

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp69.531.000 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	69.531.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2025	69.531.000
Akumulasi Penyusutan Irigasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	69.531.000

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 30 September 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2025	0
Nilai Buku per 30 September 2025	0

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp0

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp5.543.251.276.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		0	0	0

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp0

Saldo Aset Lainnya Stasiun KIPM Tahuna per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Stasiun KIPM Tahuna terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Lain-Lain
Rp0

C.3.1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun KIPM Tahuna.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2025

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Total	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Kewajiban Jangka
Pendek Rp0*

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Stasiun KIPM Tahuna per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Uang Muka dari KPPN
Rp0*

C.4.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0*

C.4.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Stasiun KIPM Tahuna per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	Gaji Induk Pegawai dan PPPK Bulan Des 2025
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	-	Gaji Induk PPNPN Bulan Des 2025
		-	Perjadin Bulan September Yg blm di SP2Dkan
		-	ATK Bulan September Yg blm di SP2Dkan
		-	Gaji PJLP Bulan Desember Yg blm di SP2Dkan
Total		-	

Ekuitas

Rp0

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp5.161.050.949. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP Rp0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp5.590.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	TH 2025	TH 2024	%
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi	0	5.590.000	(100)
Jumlah	0	5.590.000	(100)

Pendapatan Jasa berasal dari Pendapatan Jasa Karantina Perikanan dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya.

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp 0*

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.849.591.085. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	TH 2025	TH 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	0	626.954.900	(100,00)
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	8.623	(100,00)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	#DIV/0!
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	41.039.220	(100,00)
Beban Tunj. Anak PNS	0	13.566.360	(100,00)
Beban Tunj. Struktural PNS	0	10.585.000	(100,00)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	27.860.000	(100,00)
Beban Tunj. PPh PNS	0	3.328.390	(100,00)
Beban Tunj. Beras PNS	0	33.313.200	(100,00)
Beban Uang Makan PNS	0	86.430.000	(100,00)
Beban Tunjangan Umum PNS	0	17.425.000	(100,00)
Beban Uang lembur	0	71.717.000	(100,00)
Beban Gaji Pokok PPPK	0	40.238.600	(100,00)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	0	1.030	(100,00)
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	0	3.166.220	(100,00)
Beban Tunj. Anak PPPK	0	1.266.488	(100,00)
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	0	790.000	(100,00)
Beban Tunj. Beras PPPK	0	3.403.740	(100,00)
Beban Uang Makan PPPK	0	6.160.000	(100,00)
Beban Tunjangan Umum PPPK	0	1.980.000	(100,00)
Beban Uang lembur PPPK	0	1.814.000	(100,00)
Beban Pegawai (TUKIN)	-	814.025.776	(100,00)
Beban Pegawai (TUKIN) PPPK	-	44.517.538	(100,00)
Jumlah	0	1.849.591.085	(100,00)

D.3 Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp
0

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp270.421.835. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	TH 2025	TH 2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	0	38.459.365	-100
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Baku	0	231.962.470	-100
Beban Persediaan lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	270.421.835	-100

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban
Barang dan
Jasa Rp
0

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 953.616.786. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Rincian Beban Barang dan Jasa

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	TH 2025	TH 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	0	480.272.160	(100,00)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	38.380.000	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	16.028.500	(100,00)
Beban Honor Operasional Satker	0	42.596.000	(100,00)
Beban Barang Operasional Lainnya	0	45.223.230	(100,00)
Beban Bahan	0	95.233.329	(100,00)
Beban Honor Output Kegiatan	0	4.896.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	1.500.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	0	121.331.467	(100,00)
Beban Langganan Telepon	0	0	#DIV/0!
Beban Langganan Air	0	17.444.100	(100,00)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Sewa	0	9.990.000	(100,00)
Beban Jasa Profesi	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	0	80.722.000	(100,00)
Jumlah	0	953.616.786	#DIV/0!

Beban

Pemeliharaan

Rp

0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp171.241.277. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	TH 2025	TH 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	19.640.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	142.632.699	(100,00)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	8.968.578	(100,00)
Beban persediaan Suku Cadang	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	171.241.277	(100,00)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas Rp
0

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp351.824. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	TH 2025	TH 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	0	210.223.829	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	12.519.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	129.082.026	-100,00
Jumlah	0	351.824.855	-100,00

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp0

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp488.632.354. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

URAIAN	TH 2025	TH 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	367.151.382	-100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	119.825.472	-100,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Irigasi	-	1.655.500	-100,00
Beban Penyusutan Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam operasional pemerintah	-	.	#VALUE!
Jumlah Penyusutan	-	488.632.354	-100,00
Beban Amortisasi Software	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	488.632.354	-100,00

Kegiatan
Non
Operasional
Rp0

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	TH 2025	TH 2024	%
Pendapatan dari Penjualan peralatan dan mesin	0	534.425	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Kerugian Persediaan Rusak/lelang	0	0	#DIV/0!
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	28.051.259	(100,00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	-27.516.834	(100,00)

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Nihil Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp5.161.050.949

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp5.161.050.949 dan Rp0.

Defisit LO

Rp0

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp0 dan Rp4.107.255.026. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak

Kumulatif

Perubahan

Kebijakan

Akuntansi

Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2025

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1	Barang Konsumsi	-
2	Suku Cadang	-
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	-
4	Barang Persediaan Lainnya	-
Jumlah		-

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Irigasi	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp21.975.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2025

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas Rp0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp2.240.175.064.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas TA 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	-

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari:

Transfer Masuk TA 2025

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Sertifikat	Setban	-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 yang merupakan Alih status BMN dari KKP (SKIPM Tahuna) ke BKHIT (BKHIT Sulut).

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung

entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pengesahan Hibah Langsung TA 2025

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	Kantor Stasiun KIPM Tahuna	Tanah	-
Total Pengesahan			-
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir Rp

0

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp5.161.050.949.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.1 Pengungkapan Lain-lain

Tidak Ada